

PERSPEKTIF HUKUM ATAS PELANGGARAN BARANG KENA CUKAI YANG DILEKATI PITA CUKAI BUKAN PERUNTUKANNYA

Force Hanker¹⁾, Anggi Prastyono²

KPPBC Tipe Madya Pabean C Pantoloan, Jl. Raya Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu

E-mail: anggiprastyono1999@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[07-03-2021]

Revisi
[10-04-2021]

Tanggal terima
[25-05-2021]

ABSTRACT:

The sanctions imposition that have been applied to violations of taxable goods that are subject to tax bands instead of their intended can cause legal uncertainty. This study aims to determine law enforcement against perpetrators of excisable goods violations that are attached to excise stamps aren't intended for them and to find out legal perspective in Indonesia regarding the sanctions imposition for excisable goods violations that are attached with excise stamps instead of their intended. Research related to violations of excisable goods that are attached to excise stamps for non-designated items is rarely carried out. The method used is normative juridical, while data analysis was conducted qualitatively. From this study results it's concluded that, if reviewed from a legal perspective in Indonesia, law enforcement that occurs when a manufacturer or importer of excisable goods attaches excise stamps to excisable goods that aren't allocated can be penalized. This happens because factory operators or importers of excisable goods act as violations initiators or crimes perpetrators, with the intention of avoiding some tax payments for personal gain is one form of crime. The Excise Law should be reviewed, especially in relation to imposing sanctions and improving legal system in its structure terms, substance, and legal culture. Therefore, the sanctions imposition applied to excise violations can provide justice, benefit, and legal certainty.

Keywords: Excisable Goods, Excise Ribbons, Misappropriation, Criminal Sanctions, Legal Perspective

ABSTRAK:

Pemberian sanksi yang selama ini diterapkan terhadap pelanggaran barang kena cukai yang dilekati pita cukai bukan peruntukannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran barang kena cukai yang dilekati pita cukai bukan peruntukannya dan untuk mengetahui perspektif hukum di Indonesia terkait pemberian sanksi atas pelanggaran barang kena cukai yang dilekati dengan pita cukai bukan peruntukannya. Adapun penelitian terkait pelanggaran barang kena cukai yang dilekati pita cukai bukan peruntukannya masih jarang dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, jika ditinjau dari perspektif hukum di Indonesia, penegakan hukum yang terjadi apabila pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai melekatkan pita cukai pada barang kena cukai yang bukan peruntukannya dapat dikenai sanksi pidana. Hal tersebut terjadi karena pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai bertindak sebagai inisiator terjadinya pelanggaran atau pelaku kejahatan, dengan niat mengelakan sebagian pembayaran cukai demi keuntungan pribadi merupakan salah satu bentuk kejahatan. Hendaknya Undang-Undang Cukai dapat dikaji kembali khususnya terkait pemberian sanksi dan memperbaiki sistem hukum baik struktur, substansi maupun budaya hukumnya. Dengan demikian, pengenaan sanksi yang diterapkan pada pelanggaran cukai dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Barang Kena Cukai, Pita Cukai, Salah Peruntukan, Sanksi Pidana, Perspektif Hukum

1. PENDAHULUAN

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Barang-barang tertentu dengan sifat dan karakteristik yang telah diklasifikasikan tersebut kemudian disebut sebagai barang kena cukai (BKC).

Cukai menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Meskipun demikian, sebagian masyarakat masih ada yang merasa terbebani dengan cukai. Hal ini dikarenakan pungutan cukai pada dasarnya dibebankan kepada masyarakat yang menjadi konsumen akhir dari BKC tersebut. Cukai untuk rokok, contohnya. Setiap tahun, pungutan cukai rokok terus mengalami peningkatan. Untuk tahun 2021, cukai rokok mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12,5%.

Meskipun pungutan cukai dibebankan kepada konsumen akhir, namun masih ada pengusaha pabrik atau importir yang berusaha untuk menghindari pembayaran cukai sebagaimana yang telah ditentukan. Kasus yang sering ditemukan adalah melekatkan pita cukai pada barang yang bukan peruntukannya.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

(KPPBC TMP C) Pantoloan pernah mendapati kasus tersebut dalam tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2018, 2019, dan 2020, KPPBC TMP C Pantoloan menemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang dilekati pita cukai bukan peruntukannya. Jika dihitung berdasarkan jumlah, rokok yang dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya itu, berturut-turut, adalah sebanyak 41.980 batang, 65.800 batang, dan 60.120 batang.

Kasus yang ditemukan oleh KPPBC TMP C Pantoloan dalam tiga tahun tersebut merupakan bukti bahwa upaya untuk menghindari pembayaran cukai sebagaimana yang telah ditentukan masih kerap terjadi. Dari tahun ke tahun, kasus tersebut tetap ditemukan. Padahal, kasus demikian tidak hanya dikategorikan sebagai pelanggaran. Lebih dari itu, melekatkan pita cukai pada BKC yang bukan peruntukannya adalah suatu pelanggaran BKC ilegal yang memungkinkan untuk diusut dan diselesaikan secara pidana.

Pertanyaannya, mengapa kasus demikian masih saja terjadi dan terus berulang? Apakah kasus yang terus terjadi secara berulang itu disebabkan karena lemahnya kebijakan, perundang-undangan, dan sanksi untuk para pelaku tindak ilegal tersebut; atau karena upaya

penegakan hukumnya yang kurang tegas? Bagaimanapun, hal ini patut untuk dikedepankan karena hukum sejatinya harus bisa memberi kepastian, keadilan dan kemanfaatan agar kasus-kasus serupa tidak terus berulang di masa mendatang.

Bertolak dari pertanyaan-pertanyaan itu, penelitian ini dilakukan. Secara khusus, penelitian ini akan membahas sejumlah permasalahan hukum, terutama mengenai perspektif hukum di Indonesia yang terkait dengan cukai, sanksi terhadap pelaku pelanggaran BKC dengan melekatkan pita cukai pada BKC yang bukan peruntukannya, dan bagaimana penegakan hukumnya.

Selain untuk lebih memahami aturan dan kebijakan tentang cukai, penelitian ini pun bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran BKC yang melekatkan pita cukai pada BKC bukan peruntukannya diterapkan dalam penegakan hukumnya. Adapun penelitian terkait pelanggaran BKC yang dilekati pita cukai bukan peruntukannya masih jarang dilakukan. Harapannya, penelitian ini akan bisa memberi perspektif dan pengayaan tambahan terkait dengan kebijakan tentang cukai, khususnya dalam konteks penerapan sanksi bagi para pelaku tindak ilegal cukai. Lebih dari itu,

penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bersama, baik bagi masyarakat secara umum, maupun bagi para pengusaha pabrik, importir, serta aparat penegak hukum dan pemerintah sebagai pihak-pihak yang paling berkepentingan dalam menegakkan aturan dan kebijakan tentang cukai tersebut.

2. KAJIAN LITERATUR

Pasal 7 ayat (1) s.d (3) Undang-Undang Cukai menjelaskan bahwa cukai dilunasi pada saat pengeluaran untuk BKC yang dibuat di Indonesia dan pada saat diimpor untuk dipakai untuk BKC yang diimpor. Melakukan pembayaran atas cukai, melekatkan pita cukai pada BKC, dan pembubuhan tanda pelunasan pita cukai lainnya dalam BKC merupakan syarat bahwa cukai dikatakan telah dilunasi. Namun apabila BKC dilekati dengan pita cukai yang tidak diwajibkan atau bukan peruntukannya, maka BKC tersebut akan dianggap tidak dilunasi dan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku. Adapun pengenaan sanksi mengenai pelanggaran pita cukai tersebut terdapat di dalam Pasal 54 dan 29 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Terdapat beberapa perbedaan mendasar tentang unsur yang dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (2a) dan Pasal 54 Undang-Undang Cukai. Pertama, tentang subjek hukum (pelaku), dalam Pasal 29 ayat (2a) subjek hukumnya adalah pengusaha pabrik artinya orang yang melakukan kegiatan usaha secara pabrikan atau importir yang memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, sedangkan subjek hukum dalam Pasal 54 adalah setiap orang yang melakukan penawaran, melakukan penjualan atau sebagai penyedia BKC untuk dijual.

Kedua, perbuatan yang dilarang dalam Pasal 29 ayat (2a) adalah memproduksi BKC yang dilekati dengan pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang tidak diwajibkan atau bukan peruntukannya, sedangkan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 54 adalah melakukan penawaran, melakukan penyerahan, melakukan penjualan, atau sebagai penyedia BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. Ketiga, akibat yang dilarang dalam Pasal 29 ayat (2a) adalah menyebabkan kekurangan pembayaran cukai, sedangkan dalam Pasal 54 adalah adanya suatu penawaran, penyerahan,

penjualan, atau penyediaan untuk dijual BKC. Keempat, Pasal 29 ayat (2a) sebagai bagian dan masuk dalam konsep Pasal 29, sedangkan Pasal 54 berdiri sendiri tetapi memiliki unsur pokok Pasal 29 ayat (1). Kelima, Pasal 29 ayat (2a) mengancam dengan sanksi administrasi berupa denda, sedangkan Pasal 54 mengancam sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Keenam, mengenai ketentuan pita cukai yang sesuai dengan ketentuan atau yang diwajibkan.

Makna yang terkandung dalam pasal tersebut adalah pita cukai yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai yaitu, dalam hal pita cukai yang diwajibkan telah disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) butir b, berlaku ketentuan “merupakan hak pengusaha pabrik atau importir BKC yang bersangkutan sesuai dengan peruntukannya”. Menurut penalaran logika hukum bahwa “apabila tidak sesuai peruntukannya” dianggap pita cukai itu tidak dilunasi, koheren dengan Pasal 7 ayat (3) yang menyebutkan bahwa, dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap tidak dilunasi.

Dalam memperkaya teori yang akan digunakan dan menjadi salah satu acuan

dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Munthe, M. M. (2018) mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pabrik Rokok Illegal (Studi Putusan No 348/Pid. sus/2013/PN. Bgl) menyatakan bahwa undang-undang cukai merupakan undang-undang fiskal yang dalam penyelesaiannya lebih memperhatikan pemberian sanksi berupa denda yang penyelesaiannya bersifat administratif.

Namun, dikecualikan apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur-unsur kejahatan seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita cukai yang bukan haknya, hendaknya dikenakan dengan sanksi pidana. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku merupakan pengertian dari pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat dikenai pidana yang disebabkan dari perbuatannya itu, perlu dilakukan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana).

Unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan menjadi syarat untuk adanya kemungkinan sebuah

pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana terhadap suatu pelanggaran tertentu.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran BKC khususnya pelekatan pita cukai bukan peruntukannya dan perpektif hukum terhadap pemberian sanksi tersebut akan diteliti secara yuridis dengan menganalisis norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Data sekunder berupa buku-buku atau literatur yang tidak langsung diperoleh dari objek penelitian merupakan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Peraturan perundang-undangan akan digunakan sebagai bahan hukum primer dan buku-buku dan karya ilmiah akan digunakan sebagai bahan hukum sekunder (Asikin, Z., 2016). UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai merupakan bahan hukum primer yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini.

Metode analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis secara mendalam mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran BKC yang dilekati pita cukai bukan peruntukannya untuk dijadikan sebagai alasan yuridis. Hal itu dilakukan untuk dapat mengetahui ketentuan-ketentuan yang perlu direvisi sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha BKC. Setelah itu disajikan dalam bentuk analisis data deskriptif analitis mengenai gambaran umum tentang gejala dan menganalisisnya untuk menyatakan sasaran penelitian secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Kegiatan tersebut akan menjawab permasalahan dan menghasilkan sebuah kesimpulan untuk penelitian ini (Jujun S. Suriasumantri, 2017).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Barang Kena Cukai yang Dilekati Pita Cukai Bukan Peruntukannya

Pada periode 2018 s.d 2020 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Pantoloan telah melakukan beberapa kali penindakan BKC HT di wilayah pengawasan yang meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten

Parigi Moutong, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol. Dari penindakan yang dilakukan oleh Unit Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) di KPPBC TMP C Pantoloan tersebut ditemukan pelanggaran BKC HT yang dilekati pita cukai bukan peruntukannya.

Tabel. 1 Data Pelanggaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Bukan Peruntukannya di KPPBC Tipe Madya Pabean C Pantoloan

Tahun	Jumlah (Batang)	Perkiraan Nilai Barang (Rp)	Potensi Kurang Bayar (Rp)
2018	41.980	33.758.100	17.515.800
2019	65.800	42.244.000	18.172.100
2020	60.120	82.637.600	30.277.400

Sumber: data diolah dari app. penindakan KPPBC TMP C Pantoloan

Pada tahun 2018 ditemukan sebanyak 41.980 batang BKC HT yang dilekati pita cukai bukan peruntukannya dengan perkiran nilai barang sekitar Rp33.758.100,00 dan potensi kurang bayar sekitar Rp17.515.800,00. Pada tahun 2019 ditemukan sebanyak 65.800 batang BKC HT yang dilekati pita cukai bukan peruntukannya dengan perkiran nilai barang sekitar Rp42.244.000,00 dan potensi kurang bayar sekitar Rp18.172.100,00. Pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 60.120 batang BKC HT yang dilekati pita cukai bukan peruntukannya dengan perkiran nilai

barang sekitar Rp82.637.600,00 dan potensi kurang bayar sekitar Rp30.277.400,00. Data tersebut menunjukkan bahwa peredaran pelanggaran BKC HT yang dilekati pita cukai bukan peruntukannya yang berada di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Pantoloan masih seringkali ditemukan. Bahkan dalam setiap tahunnya peredaran BKC HT yang dilekati pita cukai bukan peruntukannya cenderung stabil.

Banyak faktor yang memengaruhi BKC HT yang dilekati pita cukai bukan peruntukannya masih terus beredar, tak terkecuali dari sisi penegakan hukum. Hal tersebut bisa terjadi karena dengan peraturan hukum yang ada, oknum tindak kejahatan tidak merasa jera atas pemberian sanksi yang ada.

Teori hukum murni dari Hans Kelsen menyatakan bahwa, penguasa dalam menerbitkan peraturan hukum yang diundang-undangkannya memiliki aspek rangkap, yakni peraturan hukum yang ditujukan kepada seorang/masyarakat dan ditujukan kepada hakim. Hal tersebut berarti seseorang/masyarakat diatur oleh hukum mengenai bagaimana ia harus bertindak laku. Atas peraturan hukum yang berlaku tersebut, hakim harus memberikan sanksi terhadap seseorang/masyarakat apabila menurut

pendapat hakim ia melanggar peraturan hukum yang berlaku (Ali Achmad, 2012).

Berdasarkan teori tersebut dapat dikemukakan bahwa ditetapkannya Undang-Undang Cukai adalah untuk mengatur setiap anggota masyarakat yang ingin berusaha di bidang cukai sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Apabila anggota masyarakat melakukan pelanggaran cukai, anggota masyarakat tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan cukai tersebut.

Perundang-undangan merupakan salah satu produk hukum, bukan produk politik yang dijadikan sebagai alat. Pentingnya pengembalian asas hukum yang pasti, adil dan bermanfaat akan dijadikan sebagai hakikat dalam penegasan konstitusi dalam menegakan hukum. Hal tersebut dapat diambil dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, ketentuan tersebut dapat diambil dari Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 (Mahfud M.D., 2018).

Berdasarkan hal tersebut, penulis melihat dari segi politik hukum bahwa sistem politik berperan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal hukum mana saja yang akan

dipertahankan, diganti, direvisi maupun dihilangkan. Dengan demikian, jika ditinjau dari perspektif hukum politik di Indonesia memberikan sudut pandang secara hukum bahwa, keberadaan peraturan yang mengatur tentang cukai sebelumnya dengan yang ada pada saat ini, dibentuk guna mencapai penerimaan negara dari sektor cukai yang berupa pajak tidak langsung. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa serta lebih memberikan hukum yang pasti, hukum yang adil dan hukum yang bermanfaat demi menggali potensi penerimaan cukai. Pada akhirnya, hal tersebut dapat mendorong pendapatan negara, dan menjalankan salah satu fungsinya sebagai alat *budgeter*.

Setiap penegak hukum mempunyai kepentingan sesuai kewenangannya masing-masing. Penegakan hukum pidana adalah sebuah proses dari penyidikan, penangkapan, peradilan terdakwa sampai dengan penahanan dilembaga permasyarakatan.

Agar teori penegak hukum ini berjalan, setiap penegak hukum bekerja sesuai wewengangnya. Masing-masing penegak hukum dari penyidik, jaksa penuntut dan hakim di pengadilan harus mempunyai penilaian unsur-unsur dan aturan yang sama dalam menentukan

sanksi ancaman pidananya atau administrasi berupa denda, perbuatan-perbuatan yang dilanggar. Jika penegak hukum tidak memahami hukum secara sama, berpikir sesuai logika berpikir yang benar, dan koordinasi untuk menyatukan kesepahaman secara positif, tidak akan ditemukan keadilan yang konkret. Sebaliknya, apabila penegak hukum menyamakan persepsi dalam membaca hukum secara benar akan ditemukan keadilan yang sebenarnya (Ali Achmad, 2012).

Menurut Friedman, terdapat beberapa hal yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya (Ali Achmad, 2012). Pertama, struktur hukum, yaitu membahas suatu penegakan hukum terhadap pelanggaran pita cukai bukan peruntukannya. Banyak lembaga yang terlibat untuk menyelesaikan kasus ini untuk mencapai keadilan, yaitu PPNS Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Melalui lembaga-lembaga ini, penyelesaian konflik dalam penegakan hukum seharusnya dapat dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Kedua, Substansi. Secara substansi, Undang-Undang Cukai telah mengatur tindak pidana dalam pasal-pasal nya serta

hukuman apa yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Pasal-pasal dalam undang-undang itu menjadi acuan bagi para hakim untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana itu. Pasal-pasal itu juga memberikan perlindungan kepada kepentingan dan hak-hak seseorang agar tidak dilanggar orang lain, misalnya memberikan perlindungan kepada pelaku usaha atau importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2a) UU No. 39 tahun 2007. Selain itu, ketentuan tersebut masih dipertahankan untuk mengisi kekosongan hukum, konflik norma hukum dan norma hukum yang kabur.

Ketiga, budaya. Ditinjau dari aspek budaya hukum, penerapan Pasal 29 ayat (2a) UU No. 39 tahun 2007 lebih mengedepankan penerimaan negara, dan Bea Cukai merupakan lembaga fiskal yang tujuannya mengumpulkan penerimaan negara sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Namun, bila dilihat dari sisi pelanggarannya, pita cukai bukan peruntukannya yang dibuat di pabrik oleh pelaku kejahatan dengan niat mengelakan sebagian pembayaran cukai merupakan salah satu bentuk kejahatan. Kondisi ini merupakan implikasi dari faktor sosial akan kesadaran terhadap hukum.

4.2 Persepektif Hukum di Indonesia Mengenai Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Barang Kena Cukai yang Dilekati Pita Cukai Bukan Peruntukan

Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut prinsip bahwa praduga kejahatan telah dilakukan dijadikan sebagai dasar proses peradilan mulai berjalan. Tujuan utamanya untuk menetapkan apakah perbuatan yang dilakukan merupakan perkara pidana sehingga pengenaan sanksi dapat diberikan. Jika hakim akan melakukan penelitian terhadap fakta yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ataupun tertuduh, hakim tidak perlu meminta izin kepada yang bersangkutan. Hal itu dikarenakan dalam proses penelitian tersebut tidak ada batasan dan ketergantungan terhadap kedua belah pihak, hanya proses pembuktian yang teliti dilakukan oleh hakim. Untuk kepentingan pemeriksaan pendahuluan ataupun di persidangan, penegak hukum dapat menggunakan dari berbagai sumber yang valid dan terpercaya.

Ade Saptomo (2010) mengatakan bahwa ada tiga pendekatan yang digunakan oleh hakim sebagai prinsip dalam membuat keputusan yang nyata. Pertama, pendekatan legalistik, yaitu pendekatan oleh hakim yang digunakan

untuk menyelesaikan kasus hukum konkret yang sudah diatur jelas secara hukum yang nyata yang kemudian dipertemukan dalam undang-undang. Kedua, pendekatan interpretatif hukum. Dalam menegakkan hukum yang adil dan benar, apabila terdapat aturan normatif yang tidak jelas, keadilan dan kebenaran dalam hukum harus dapat ditemukan oleh hakim. Ketiga, pendekatan antropologis. Hakim harus bisa menemukan hukum apabila terdapat kasus hukum yang nyata belum diatur di undang-undang dengan cara menyesuaikan diri dengan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat.

Ketiga pendekatan itu dijadikan acuan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Interpretasi dari hukum tertulis adalah kepastian hukum itu sendiri. Sebagaimana pada Pasal 29 ayat (2a) Undang-Undang Cukai, subjek hukum dapat saja melakukan pelanggaran terhadap pelekatan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya atau yang tidak diwajibkan dengan sengaja demi keuntungan pribadi, ketika memiliki dokumen perizinan yang sah dan mengelakan pembayaran cukai dari pita cukai yang diwajibkan menjadi pita cukai yang tidak diwajibkan dengan cara mengurangi tarif pajak cukai, sehingga terjadi pelanggaran cukai. Hakim sebagai pemegang otoritas dalam

memutuskan perkara tentunya harus tetap berdiri berdasarkan pada asas hukum yang pasti dan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku. Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak terjadi anomali dari berbagai pihak yang terlibat.

Terjadinya hukum yang kosong, hukum yang menuai konflik dan norma hukum yang kabur, terkadang dapat dijumpai ketika mengidentifikasi aturan hukum ketika deduksi dalam hukum awal dilakukan (Asikin, Z., 2016).

Setiap orang harus berpegang pada asas *curia novit* ketika menghadapi hukum yang kosong, hukum yang menuai konflik dan norma hukum yang kabur. Dengan asas tersebut, hakim dianggap mengerti hukum. Jika terdapat perkara yang akan diajukan karena kekosongan hukum, atau norma hukum yang kabur, hakim tidak boleh menolak. Hakim wajib mencari tahu mengenai nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat. Jika terjadi konflik hukum, hakim berpegang pada asas penyelesaian konflik undang-undang.

Adapun asas penyelesaian konflik undang-undang tersebut antara lain, yang pertama, undang-undang yang terbit terbaru menyalahgunakan undang-undang yang terbit terdahulu (*lex posterior derogat legi priori*). Kedua, undang-undang yang dikategorikan khusus

menyalahgunakan undang-undang yang dikategorikan umum (*lex specialist derogat legi generali*). Ketiga, undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi menyalahgunakan undang-undang yang kedudukannya lebih rendah (*lex superior derogat legi inferiori*). Jika terdapat norma hukum yang kabur, hakim akan berpegang pada interpretasi dan penafsiran (Asikin, Z., 2016)

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, suatu perkara pidana akan diserahkan ke hadapan hakim untuk diputuskan apabila ada kesalahan yang terjadi dalam hukum yang kosong, hukum yang menuai konflik, serta norma hukum yang kabur. Hakim akan mengambil wewenangnya untuk membentuk hukum sehingga dapat menyesuaikan undang-undang dengan fakta konkret, atau menambah undang-undang apabila diperlukan.

Bea dan Cukai sebagai aparat penegak hukum, memiliki alur proses peradilan dari penindakan ketika ditemukan pelanggaran dengan ketentuan BKC dilekati dengan pita cukai yang tidak diwajibkan/bukan peruntukan. Hal tersebut akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan, lalu penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan. Kejaksaan harus memahami ada konflik hukum yang

terjadi dalam pasal-pasal yang disangkakan. Untuk menyelesaikan konflik hukum itu merupakan wewenang hakim, bukan wewenang jaksa. Dari tahapan-tahapan itu, untuk membuktikan asas *curia novit* berkerja sesuai fungsinya, konflik hukum yang terjadi yang dituangkan dalam berkas perkara penyidikan telah berada di depan hakim untuk diperiksa di pengadilan, dan diputuskan sesuai kewenangannya. Apabila tidak diajukan ke hadapan hakim, hakim tidak mengetahui adanya polemik yang terjadi pada kesenjangan undang-undang akibat konflik norma hukum, dan norma hukum yang kabur.

Kestabilan antara hak dan kewajiban dengan mempertimbangkan penerimaan negara dari sisi penerimaan cukai dapat terjadi apabila undang-undang cukai dapat ditegakkan dengan baik secara proposional. Apabila kita menilik lebih jauh mengenai filosofi kebijakan cukai, tindakan preventif dan kuratif perlu dilakukan dalam hal pengawasan peredaran rokok illegal. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian terhadap peredaran rokok illegal dapat lebih ditegakkan.

Dalam konteks keadilan hukum diharapkan bahwa setiap orang bertindak dengan adil tanpa adanya diskriminatif

ataupun kepentingan individu terhadap tindakan pelanggaran cukai. Tidak dapat disangkal bahwa untuk menciptakan suatu sistem atau tatanan sosial politik yang aman dan kondusif, pemerintah harus berperan secara aktif. Dengan demikian, hal tersebut akan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan kesiapan dari pemerintah dengan memperhatikan perkembangan pelanggaran cukai sehingga pungutan pajak cukai untuk mengisi pundi-pundi negara dapat diperoleh dengan optimal.

Tugas dari hukum yang berperan sebagai penjamin kepastian hukum, salah satunya adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Perkembangan zaman menyebabkan masyarakat berkembang secara cepat dalam berkomunitas atau bernegara. Kebutuhan itu harus dipenuhi sesuai dengan zamannya. Ketentuan ini memang tidak berkaitan langsung dengan kepastian hukum. Oleh karena itu, hukum tidak akan berubah keadaannya tanpa dilakukan penyesuaian antara hukum dan perilaku masyarakat kekinian atau akan terjadi kekacuan hukum (Mertokusumo, 2011).

Kaidah hukum merupakan alat yang mengatur hubungan antarmanusia yang juga sebagai payung hukum terhadap

kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya. Eksistensi dari hukum itu sendiri ialah apabila hukum itu dapat memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari negara. Hukum sejatinya adalah payung bagi masyarakat.

Untuk itu, hukum yang kontekstual perlu dilakukan, sehingga norma hukum yang telah disepakati dapat mengakomodir praktik-praktik sosial yang terjadi di masyarakat. Artikulasi hukum ini akan menciptakan hukum yang sesuai cita-cita masyarakat. Muara hukum tidak hanya mengenai keadilan dan kepastian hukum saja, melainkan juga harus memenuhi aspek kemanfaatan. Penganut mazhab utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga, di samping keadilan dan kepastian hukum. Dilanjutkannya kemanfaatan bagi seluruh orang dalam berkomunitas atau bernegara merupakan tujuan dari hukum (Dardji Darmohardjo, 2019).

5. SIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, jika ditinjau dari perspektif hukum di Indonesia, penegakan hukum yang terjadi apabila pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai melekatkan

pita cukai pada barang kena cukai yang bukan peruntukannya dapat dikenai sanksi pidana. Hal tersebut terjadi karena pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai bertindak sebagai inisiator terjadinya pelanggaran atau pelaku kejahatan, dengan niat mengelakan sebagian pembayaran cukai demi keuntungan pribadi merupakan salah satu bentuk kejahatan.

Adapun rekomendasi yang diberikan oleh penulis kepada institusi Kepabeanan dan Cukai adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Undang-Undang Cukai dapat dikaji kembali, khususnya terkait pemberian sanksi dan hendaknya memperbaiki sistem hukum baik struktur, substansi maupun budaya hukumnya agar penegakan hukum yang diberikan dapat memberikan efek jera;
2. Hendaknya pengenaan sanksi pidana yang diterapkan pada pelanggaran cukai dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, C. (2015). *Badan Hukum Bisnis*. Alumni Bandung. Hlm. 1. Edisi Terbaru
- Achmad, Muktifajardan Yulianto. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Belajar. Cetakan Ke-2

- Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
- Achmad, Ali. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana. Cetakan Ke-4
- Darmohardjo, D. S. (2019). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Edisi Revisi Terbaru
- Saptomo, A. (2010). *Hukum & Kearifan Lokal*. Grasindo.
- Sutrisno, E. (2015). *Bunga Rampai Hukum Dan Globalisasi*. In Media.
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- Suriasumantri, S.J. (2017). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan. Cetakan Ke-22
- Lili Rasjidi dan Putra, I.W. (2013). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Fikahati Aneska
- Mohammad, D. M.M. (2018). *Politik Hukum Di Indonesia*. Rajawali Pers. Cetakan 8
- Mertokusumo, S. (2011). *Teori Hukum* (1st Ed.). Universitas Atma Jaya.

JURNAL, MAKALAH

- Zaini, D.Z. (2020). Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat). *Jurnal Hukum*, 28(2), 929. <https://doi.org/10.26532/Jh.V28i2.220>. Hlm. 930-933
- Ika (2018). Konsep Keadilan Menurut Hukum Murni Hans Kelsen. Universitas Gajah Mada
- Anas, Anwar (2020). Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman. Owntalk
- Magdalena, Damai. (2018). Perluasan Makna Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat Mengakibatkan

Ketidakpastian Hukum. Jurnal
Legislasi Indonesia Vol 15 No.4 -
Desember 2018 : 343-354
Munthe, M. M. (2018).
Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap Pabrik Rokok Illegal (Studi
Putusan No 348/Pid.
sus/2013/PN.Bgl).

UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indoneisa Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 tahun 1995
tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 20039
Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan Menteri keuangan Nomor
68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan
Cukai

WEB

Kompas.com. (2021). *Simak, ini patokan
kenaikan harga rokok setelah cukai
naik.* Kompas.com.
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/03/113.....diakses> 05 Maret
2021